

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang dikenal dunia sebagai negara kepulauan terbesar nomor 4 dengan jumlah 13.000 pulau dan jumlah penduduk 275 juta jiwa per tahun 2002. Letak Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Australia, Filipina, Kepulauan Andaman, Nikobar, Singapura dan Malaysia. Batas negara Indonesia dengan negara-negara tersebut ada yang berbatasan laut dan ada juga yang berbatasan langsung dengan darat. Dengan letak yang seperti ini ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah semakin banyak wilayah maka Indonesia harus siap menjaga dan melindungi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, hal ini harus dilakukan karena daerah perbatasan cenderung mudah memicu konflik seperti sengketa wilayah antar negara. Sedangkan dampak positifnya adalah Indonesia bisa dengan mudah menjalin kerja sama dalam bidang apapun.

Kawasan perbatasan laut dan kawasan perbatasan darat yang dimiliki Indonesia memberikan banyak keuntungan karena letaknya strategis. Kawasan perbatasan adalah kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan vital dari semua sudut pandang baik dari segi pertahanan, keamanan, social, ekonomi, dan budaya. Kawasan perbatasan juga dapat dikatakan sebagai tempat pertumbuhan bagi ekonomi dalam negeri maupun luar negeri karena kegiatan perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan biaya yang tidak mahal dan juga dapat dilakukan dengan

mudah sehingga hal ini mendorong produktifitas, pendapatan masyarakat perbatasan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi karakteristik dan infrastruktur di kawasan perbatasan pada umumnya memiliki akses yang cukup sulit di jangkau karena termasuk dalam daerah terbelakang. Hal ini disebabkan oleh buruknya infrastruktur jalan yang ada dikawasan perbatasan, alat komunikasi yang kurang memadai, kurangnya informasi, listrik dan air bersih yang tidak terpenuhi serta pendidikan yang kurang layak.

Sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan sungguh sangat melimpah seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, dan destinasi wisata. Beberapa hal ini dapat dikembangkan dan menjadi pemasukan bagi wilayah tersebut, akan tetapi pemanfaatan yang dilakukan di daerah perbatasan relatif kurang baik karena sumber daya manusia yang dimiliki kurang. Hal ini berdampak pada rusaknya kawasan tersebut, hilangnya pekerjaan, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan.

Pengembangan wilayah perbatasan negara merupakan hal yang krusial dari rencana jangka panjang menengah nasional dalam rangka memperkuat integritas dan kedaulatan wilayah. Pengelolaan perbatasan ini dilakukan dengan prinsip pembangunan dari daerah-daerah dan desa dalam hal negara kesatuan. Ranai et al (2020) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla cenderung memprioritaskan pengembangan infrastuktur di wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dan krusial dalam hal mempertahankan kedaulatan suatu negara. Maka dari itu ada beberapa aturan yang

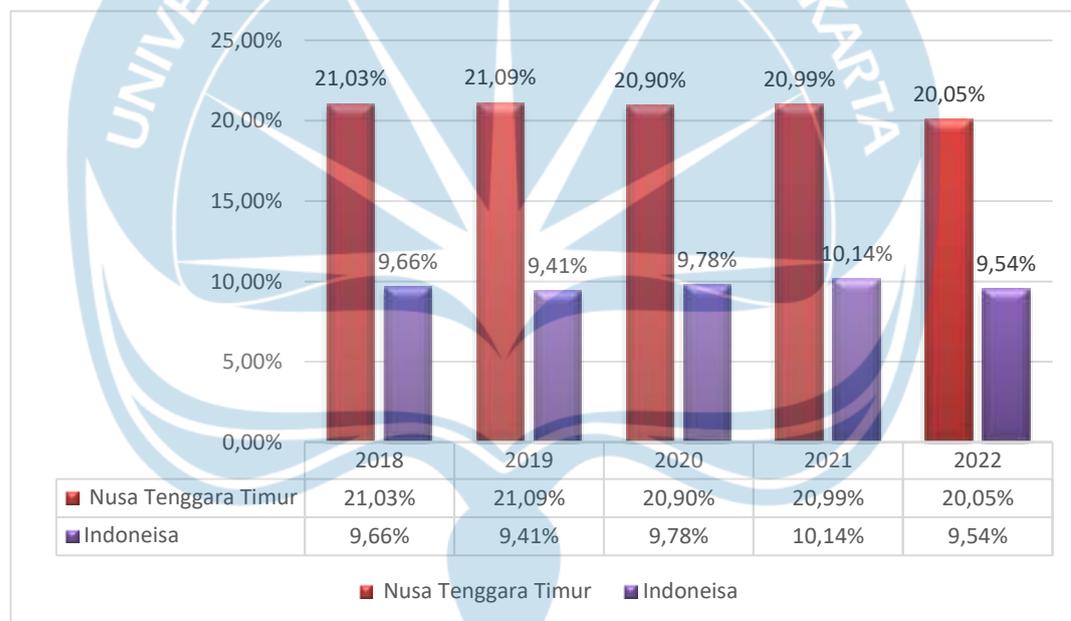
khusus mengatur pengelolaan kawasan perbatasan, salah satunya adalah Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara. UU tersebut menjelaskan bahwa kawasan negara dikelola oleh badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang yang berlaku. Untuk membangun kawasan perbatasan diperlukan membuat anggaran khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan demikian program kerja yang dilaksanakan oleh badan pengelola kawasan perbatasan memiliki anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan dan anggaran khusus yang dikeluarkan pemerintah masih saja belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini karena masih banyak masalah yang ditemui di daerah perbatasan. Salah satu masalah yang ada di daerah perbatasan adalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan, karena berkaitan dengan banyak faktor seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya dan penghasilan. Hal-hal ini lah yang akhirnya membentuk “Lingkaran Setan Kemiskinan”.

Menurut Suharto (2009) dalam Dita (2009) kemiskinan secara konseptual, dapat dilihat dari empat faktor, yaitu Faktor Individual, Faktor Sosial, Faktor Kultural dan Faktor Struktural. Faktor Individual adalah kemiskinan yang disebabkan dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kemiskinan. Faktor Sosial adalah kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang atau suatu penduduk menjadi miskin, contohnya seperti diskriminasi usia, gender, etnis, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang menjadi miskin. Faktor Kultural adalah budaya yang menyebabkan kemiskinan,

faktor ini lebih mengarah pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup dan mental dari individu. Faktor Struktural adalah faktor yang merujuk pada struktur atau system yang tidak adil, sensitive, dan tidak adapat diakses sehingga menyebabkan seseorang menjadi miskin atau sekelompok orang menjadi miskin.

Salah satu provinsi di Indonesia yang berada di perbatasan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini berbatasan darat dengan Negara Timor Leste tepatnya pada Kabupaten Belu.



Sumber: Badan Pusat Statistic (BPS)

Gambar 1.1
Angka Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, dan
Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)

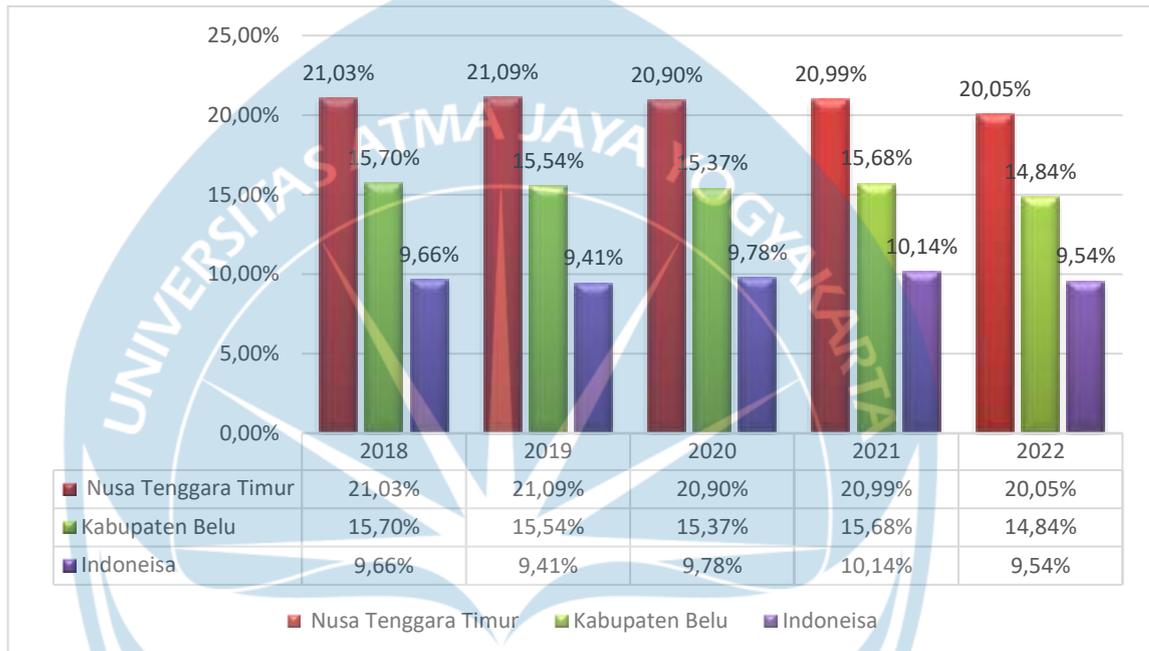
Jumlah penduduk miskin di NTT masuk dalam urutan ketiga terbanyak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2018 sampai 2022 persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur berada jauh diatas angka kemiskinan negara yaitu mencapai rata-rata 20,81% sedangkan rata-rata

kemiskinan negara berada di angka 9,71%. Terdapat fluktuasi persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang cenderung terus meningkat, meskipun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan.

Selain provinsi Nusa Tenggara Timur adapula provinsi Kalimantan Barat yang berada di wilayah perbatasan. Kalimantan Barat langsung berbatasan darat dengan negara Malaysia. Provinsi Kalimantan Barat memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur, rata-rata persentase kemiskinan selama 5 tahun di Kalimantan Barat yaitu 7,3% sedangkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun terakhir yaitu 20,81%. Dilihat dari persentasenya provinsi Kalimantan Barat sudah berada dibawah persentase kemiskinan negara.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah yang langsung berbatasan dengan negara Timor Leste, wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Belu. Kabupaten Belu memiliki luas wilayah 1.284,94 km², wilayah ini beribu kota di Atambua, terdapat 12 kecamatan yaitu Raimanuk, Tasifeto barat, Kakuluk Mesak, Nanaet Duabesi, Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat. Lamaknen, dan Lamaknen Selatan, kecamatan-kecamatan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dengan daerah yang tidak berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kecamatan yang berbatasan langsung adalah kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, dan Lasiolat. Wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan Timor Leste adalah kecamatan Raimanuk, Tasifeto Barat, Atambua, Atambua Selatan, Atambua Barat, dan Kakuluk Mesak.

Katadata Media Network menyatakan (CNBC Indonesia, 2023) menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu berada pada peringkat 17 dari 22 Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Artinya, Kabupaten Belu menempati posisi 6 terbawah dengan persentase penduduk miskin terbanyak.



Sumber: Badan Pusat Statistic (BPS)

Gambar 1.2
Angka Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, dan Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)

Kabupaten Belu pada tahun 2018 angka kemiskinannya mencapai angka 15,70%, angka ini menurun tapi tidak signifikan sampai pada tahun 2020 hingga menyentuh angka 15,37%, lalu meningkat lagi pada tahun 2021 dikarenakan masa pandemic Covid-19 hingga menyentuh angka 15,68%. Pandemi ini tidak hanya berdampak kepada Kabupaten Belu saja tetapi ke semua daerah bahkan negara luar juga terdampak akan hal ini. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Belu mencapai angka terendah selama 5 tahun terakhir yaitu di angka 14,84%. Meskipun angka terendahnya berada di angka 14,84% tetap saja berada diatas

angka rata-rata kemiskinan di Indonesia.

Wilayah perbatasan, memiliki potensi yang cukup besar dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, akan tetapi berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu, masih diatas garis kemiskinan Indonesia.

Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum utama dalam peraturan perundang-undangan, yang tercantum pada Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dan Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan adanya peraturan ini maka pemerintah mencoba menanggulangi kemiskinan dari berbagai bidang seperti bidang social, ekonomi, dan agama.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan hasil yang diberikan masih belum terlihat terutama di daerah perbatasan. Pemerintah masih belum bisa menjangkau daerah-daerah perbatasan Indonesia bagian timur khususnya di Kabupaten Belu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan kondisi daerah perbatasan Indonesia Timor Leste khususnya di Kabupaten Belu masih berada jauh melebihi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengambil tema kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste khususnya di Kabupaten Belu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan antara kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dengan kecamatan yang tidak berbatasan langsung (non perbatasan) di Kabupaten Belu?
2. Penyebab dan implikasi dari kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan dan Non perbatasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan antara wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah yang tidak berbatasan langsung (non perbatasan) di Kabupaten Belu.
2. Untuk melihat penyebab kemiskinan di wilayah perbatasan dan non perbatasan di Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat untuk.

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi kedepannya agar dapat menentukan langkah yang

terbaik dalam pengambilan keputusan terkait kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Belu yang langsung berbatasan dengan negara lain.

2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai daerah perbatasan serta kondisinya yang memprihatinkan, serta mengundang semangat untuk ikut serta membangun.
3. Bagi pembaca, dapat menjadi bahan literasi mengenai daerah perbatasan dan juga dapat membantu para peneliti lain yang ingin meneliti mengenai kemiskinan di Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada penelitian ini Bab I menjelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini Bab II menjelaskan uraian teori dan bukti empiris mengenai ekonomi perbatasan dan kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini Bab III menjelaskan uraian mengenai jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan batasan operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini Bab IV menjelaskan uraian mengenai analisis hasil dari data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada penelitian ini Bab V menjelaskan uraian mengenai kesimpulan dan saran yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.

